



KEMISKINAN KRONIS PANGAN DAN HAK ATAS PANGAN DAN GIZI

INFOBRIEF

Amir Mahmud



Sumber: ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

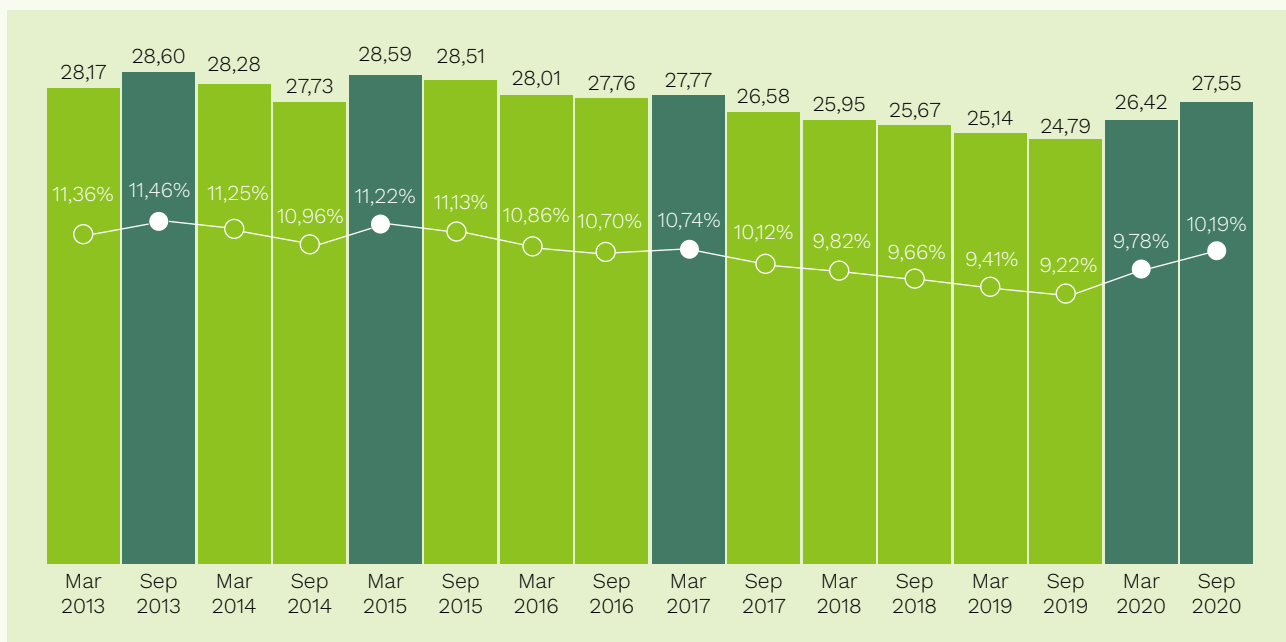
POIN-POIN PENTING

- 1 Masyarakat di Indonesia menghadapi kemiskinan kronis pangan karena kantong untuk pengeluaran makanan lebih 50%, dan harga pangan berdampak potensial pada kemiskinan. Konsekuensinya, terjadi pergeseran golongan miskin menjadi semakin miskin, dan golongan rentan miskin menjadi miskin karena mereka terkendala antara lain pada aspek ketersediaan aneka pangan (dominan beras), keterjangkauan secara ekonomi dan kecukupan kandungan pangan.
- 2 Kemiskinan kronis pangan sangat membahayakan kehidupan golongan miskin dan golongan rentan miskin karena strategi pengorbanan diri mereka melalui pengerutan ke dalam dengan merealokasi dan memperketat porsi peruntukan pendapatan, mengurangi kualitas dan kuantitas jenis pangan yang dikonsumsi, dan tingkat distribusi pangan antar anggota rumah tangga (suami, istri dan anak).
- 3 Pergeseran pola konsumsi pangan terutama jenis komoditas makanan menunjukkan kecenderungan penurunan konsumsi beras yang berganti pada konsumsi terigu dan produk turunannya sekalipun masih berfluktuasi jumlahnya

PENGANTAR

Persoalan kemiskinan di Indonesia bukan seperti ‘angka-angka magis’ semata yang dapat turun-naik pada bulan Maret dan September tiap tahun. Namun, setiap angka adalah representasi sekaligus perwujudan dari permasalahan pangan dan terancamnya keselamatan warga negara¹ Upaya menekan angka kemiskinan terlihat dari angka kemiskinan sepanjang 2013-2020 sekalipun terdapat fluktuasi jumlah dan persentasenya. Sepanjang tujuh tahun itu, tingkat kemiskinan terendah berjumlah 24,79 juta (9,22%) yang terjadi pada September 2019 namun angkanya naik kembali sebesar 26,42 juta (9,78%) pada Maret 2020 dan sebesar 27,55 juta (10,19%) pada September 2020. Di balik itu, tingkat kemiskinan sebesar 24,79 juta (9,22%) pada September 2019 itu dikontribusikan oleh garis kemiskinan makanan sebesar 73,75% terhadap garis kemiskinan (Rp 440.538/kapita/bulan).

Diagram 1 - Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2013 - September 2020



Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020 No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan atau kemiskinan salah satunya ditentukan oleh pengeluaran kebutuhan minimum pada makanan. Tingkat pengeluaran makanan lebih besar daripada tingkat pengeluaran non-makanan menunjukkan bahwa golongan miskin semakin miskin. Dapat dikatakan bahwa golongan miskin sangat rentan atas pangan dan/atau kerentanan pangan seseorang menyebabkan terkategori golongan miskin.

Dengan demikian alokasi pengeluaran untuk kebutuhan minimum terhadap makanan perlu terpenuhi dan terjamin bagi tiap orang khususnya golongan miskin agar penurunan tingkat kemiskinan berhasil pada satu sisi, dan yang lebih penting di sisi yang lain untuk misi pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Alokasi pengeluaran untuk makanan itu tanpa harus mengganggu alokasi pengeluaran untuk non-makanan mereka. Atas dasar pemikiran tersebut, situasi seperti apa yang terlihat dan tidak terlihat pada angka kemiskinan dalam konteks ukuran garis kemiskinan makanan sekaligus pemenuhan hak

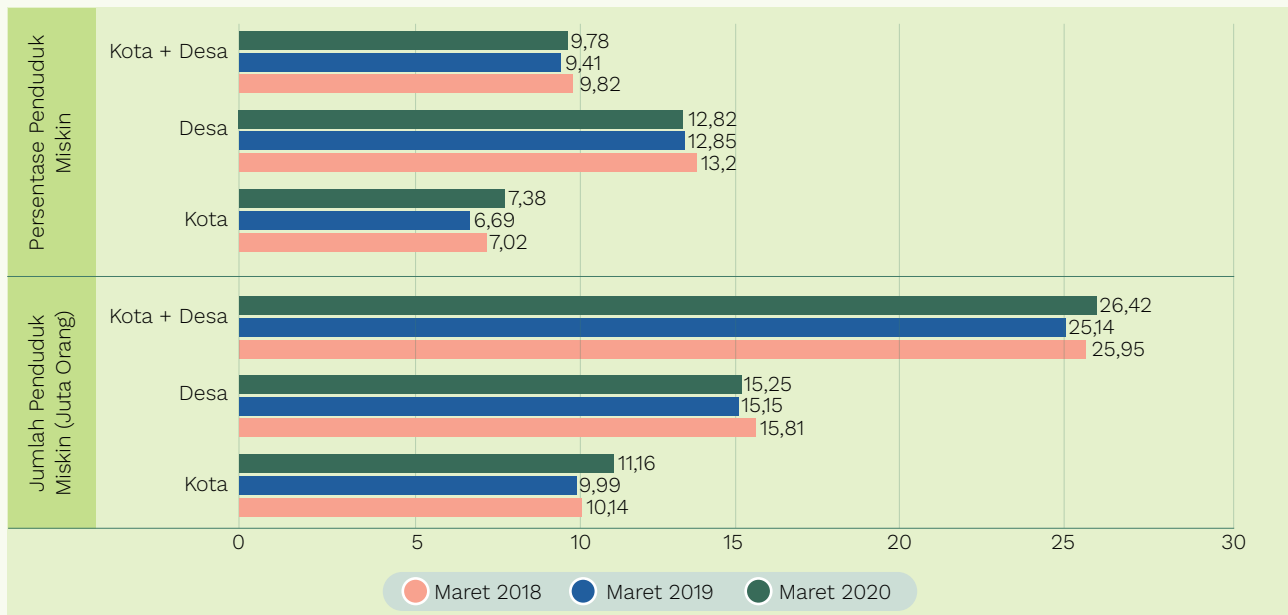
[1] Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menentukan garis kemiskinan yaitu garis kemiskinan makanan (paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi) dan garis kemiskinan non-makanan (paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan). Lihat lebih lanjut di <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23> [diakses pada 26 November 2021].

atas pangan dan gizi? Tulisan ini berupaya menggali dan menguraikan garis kemiskinan makanan, dan pola konsumsi pangan beserta perubahannya pada suatu periode tertentu dalam suatu bingkai hak atas pangan. Sebab golongan miskin cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya terutama pangan yang layak dengan kondisi keterbatasan pendapatan/pengeluarannya termasuk akses pada bidang lainnya sehingga berisiko jangka panjang pada timbulnya ragam gangguan fungsi organ tubuh hingga penyakit.

JUMLAH KEMISKINAN DAN GARIS KEMISKINAN MAKANAN

Sepanjang tiga tahun dari Maret 2018 hingga Maret 2020, angka kemiskinan turun sebesar 0,81 juta (0,41%) pada Maret 2018-Maret 2019 dan kembali naik sebanyak 1,28 juta (0,37%) pada Maret 2019-Maret 2020. Berdasarkan daerahnya, kemiskinan terbanyak berada di perdesaan secara berturut-turut selama tiga tahun daripada di daerah perkotaan. Misalnya, pada Maret 2020 kemiskinan di perdesaan mencapai 15,25 juta dan di perkotaan sebanyak 11,16 juta.

Diagram 2 - Jumlah dan Persentase Kemiskinan di Indonesia

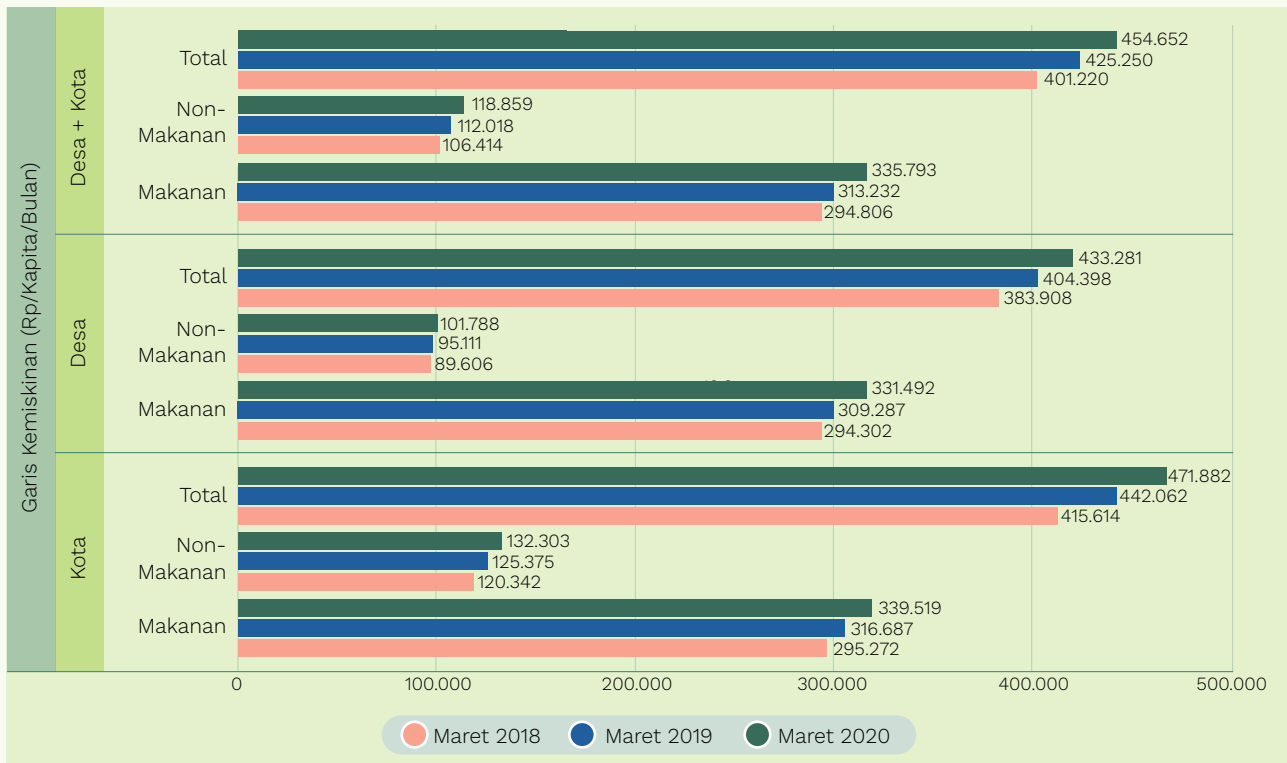


Sumber: BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019; BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020

Besaran angka kemiskinan tersebut didasarkan pada garis kemiskinan perkapita/bulan, yang sepanjang tiga tahun berturut-turut naik pada tingkat nasional yaitu Rp 401.220, Rp 425.250, dan Rp 454.652. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 454.652 saja telah terdapat 26,42 juta jiwa pada Maret 2020, maka kenaikan garis kemiskinan semakin memperbanyak jumlah golongan miskin. Yang perlu disingkap adalah seberapa banyak golongan rentan miskin yang berada sedikit di atas garis kemiskinan yang disebut rentan miskin, sehingga dapat mendeteksinya dan mencegah jatuh miskin.

Ditilik secara lebih mendalam, garis kemiskinan makanan menyumbang angka yang sangat besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan garis kemiskinan non-makanan. Tercatat bahwa garis kemiskinan makanan semakin naik dan berperan besar di atas 70% terhadap garis kemiskinan, dengan rincian 73,4% (Maret 2018), 73,6% (Maret 2019) dan 73,8% (Maret dan September 2020). Kenaikan garis kemiskinan itu sama-sama terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Kondisi besarnya kontribusi komponen garis kemiskinan makanan pada garis kemiskinan sebenarnya sangat mengkhawatirkan karena sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga pangan, maka dapat berpengaruh tidak hanya pada jumlah golongan miskin bertambah kuantitasnya tapi juga semakin sulitnya akses ekonomi golongan miskin terhadap pangan.

Diagram 3 - Garis Kemiskinan Maret 2018-Maret 2020



Sumber: BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019; BPS, Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020

Kekhawatiran peningkatan kemiskinan itu sangat beralasan terkait dengan peran pangan dalam kebutuhan sehari-hari dan harga pangan. Pada tahun 2020 saja terdapat enam jenis komoditas yang berkontribusi pada garis kemiskinan makanan di perkotaan mencakup beras (20,22 persen), rokok kretek filter (12,16 persen), telur ayam ras (4,30 persen), daging ayam ras (4,13 persen), mie instan (2,34), dan gula pasir (2,05 persen), sedangkan di perdesaan berupa beras (25,31 persen), rokok kretek filter (10,98 persen), telur ayam ras (3,72 persen), gula pasir (2,92 persen), daging ayam ras (2,43 persen), dan mie instan (2,12 persen).² Potret ini menempatkan beras pada posisi penting dan dominan dalam pengeluaran rumah tangga. Pada waktu tertentu, beras berkontribusi besar pada tingkat inflasi sehingga perlu dicermati dan dikontrol harganya agar tidak terpengaruh pada kemiskinan. Sejauh ini jenis pangan seperti beras dan telur ayam dapat dikatakan sebagai menu andalan sederhana bagi rumah tangga dengan sumber karbohidrat dan protein, tanpa sayuran.

Kenyataan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan pangan berperan besar pada angka garis kemiskinan makanan, dan dalam membentuk angka garis kemiskinan dan jumlah golongan miskin, sehingga pola kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan yang sangat terpengaruh gejolak pangan. Pola kemiskinan seperti ini terjadi pada golongan berpendapatan rendah atau golongan rentan lainnya yang kurang memperoleh ketersediaan pangan yang layak, dan minimnya akses ekonomi pada pangan. Terjadinya kenaikan harga pangan memperparah kesulitan ekonomi untuk pembelian/pertukaran pangan mereka. Atas kenaikan harga pangan itu pula, golongan rentan miskin (golongan yang dekat dengan garis kemiskinan) berpotensi semakin terpuruk karena mereka akan jatuh pada kategori golongan miskin. Sebab, fluktuasi harga pangan, harga pangan yang stabil tinggi (harga tinggi dalam jangka waktu tertentu) dan inflasi akan menekan daya beli konsumen, sehingga dianggap menggerogoti uang rakyat.³ Keberadaan daya beli pangan yang terpengaruh oleh besaran inflasi dan harga pangan itu ditambah kesulitan pada pendapatan yang terbatas untuk alokasi pengeluaran pangan.

[2] BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020, hal. 5.

[3] Khudori, Inflasi, Pangan, dan Kemiskinan, opini, ekonomi.bisnis diakses pada <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180802/9/823467/opini-inflasi-pangan-dan-kemiskinan> tanggal 27 Oktober 2021.

Bila terjadi instabilitas harga pangan terutama kenaikan pangan dan pendapatan yang tidak memadai, maka rumah tangga miskin diperkirakan akan menjalankan strategi pengorbanan diri melalui pengerutan ke dalam.⁴ Misalnya, merealokasi sekaligus memperketat porsi peruntukan pendapatan (pangan, pendidikan, kesehatan dan lainnya) dan mengurangi kualitas dan kuantitas jenis pangan yang dikonsumsi termasuk tingkat distribusi pangan antar anggota rumah tangga (suami, istri dan anak). Upaya pengerutan ke dalam pada tingkat rumah tangga seperti ini berdampak sangat buruk terhadap kualitas kesehatan rumah tangga terutama ibu dan anak.

PERUBAHAN POLA PANGAN DAN KECUKUPAN KALORI DAN PROTEIN

Pada Maret 2020 pengeluaran makanan perkapita per bulan sebesar 603.236 yang diisi oleh enam kelompok komoditas pangan teratas berdasarkan persentasenya yaitu makanan dan minuman jadi (34,27 persen), rokok dan tembakau (12,17 persen), padi-padian (11,07 persen), ikan/udang/cumi/kerang (7,72 persen), sayur-sayuran (7,52 persen), dan telur dan susu (4,36 persen).⁵ Kondisi ini sama dengan Maret 2019 dari segi urutan kelompok komoditasnya, namun komoditas daging di urutan keempat pada Maret 2018. Dengan demikian anggota rumah tangga lebih banyak bergantung pada upaya pembelian terhadap pangan jadi untuk pemenuhan pangan mereka daripada memasak atau mengolah sendiri.

Bila diperiksa lebih rinci terkait dengan jenis makanan yang banyak dikonsumsi dari segi rata-rata konsumsi dan pengeluaran perkapita per bulan, maka tercatat 7 jenis komoditas dengan nilai pengeluaran tertinggi. Jenis komoditas itu yakni beras (Rp 63.055 setara 6,45 kg), ikan dan udang segar (Rp 38.501 setara 1,43 kg), daging ayam ras/kampung (Rp 18.432 setara 0,56 kg), telur ayam ras/kampung (Rp 14.785 setara 9,37 butir), minyak kelapa/goreng (Rp 12.299 setara 1,00 liter), ikan dan udang diawetkan (Rp 8.069 setara 1,77 ons), dan gula pasir (Rp 7.842 setara 5,37 ons).⁶ Perbedaan terjadi pada tahun 2018 karena jenis daging sapi masuk dalam urutan tujuh besar. Perbandingan antara daerah di bulan Maret 2020 menyebutkan bahwa perdesaan lebih tinggi nilai pengeluaran untuk tiga jenis komoditas yakni beras, minyak kelapa/goreng dan gula. Menonjolnya beras mengindikasikan bahwa penganekaragaman sumber utama karbohidrat selain beras masih belum berjalan efektif. Sekalipun terdapat ketela pohon/singkong dengan pengeluaran/konsumsi Rp 1.635 setara 0,40 kg per kapita/bulan namun belum menjadi pola pangan penting yang beragam. Pada sisi yang lain, konsumsi gula yang tidak terkendali dapat menimbulkan efek buruk pada kesehatan seperti peningkatan berat badan, risiko diabetes dan tekanan darah tinggi.

Sejauh ini terdapat kecenderungan perubahan pola pangan pada tahun 2018 hingga 2020 terkait dengan konsumsi pangan pada jenis komoditas beras, dan tepung terigu. Bahkan tren perubahan itu dapat terlihat pula sejak tahun 2016. Rata-rata konsumsi beras terus berkurang dari 7,135 kg pada tahun 2016 kemudian 6,62b kg tahun 2018, dan turun lagi menjadi 6,451 kg pada tahun 2020.

[4] Pengerutan ke dalam untuk menggambarkan langkah-langkah pengetatan dengan mengeskplotasi diri tiap anggota rumah tangga yang berdampak buruk pada ketidackukupan asupan pangan dan gizi, hingga terganggunya fungsi organ tubuh secara normal dan mudah timbulnya ragam penyakit.

[5] BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Susenas Maret 2020, hal. 93

[6] BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Susenas Maret 2020, hal. 88.

Tabel 1 - Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan menurut Beberapa Jenis Makanan, Maret 2016-2020

| No. | Jenis Komoditas | Satuan | Maret 2016 | Maret 2017 | Maret 2018 | Maret 2019 | Maret 2020 |
|-----|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Beras (beras lokal, kualitas unggul, impor) | Kg | 7,135 | 6,708 | 6,628 | 6,446 | 6,451 |
| 2. | Jagung basah dengan kulit | Kg | 0,151 | 0,110 | 0,126 | 0,167 | 0,216 |
| 3. | Jagung pipilan/beras jagung/jagung titi | Kg | 0,092 | 0,080 | 0,082 | 0,072 | 0,063 |
| 4. | Ketela pohon/singkong | Kg | 0,313 | 0,522 | 0,389 | 0,359 | 0,397 |
| 5. | Ketela rambat/ubi jalar | Kg | 0,295 | 0,301 | 0,258 | 0,263 | 0,252 |
| 6. | Tepung terigu | Kg | 0,194 | 0,213 | 0,217 | 0,208 | 0,202 |
| 7. | Mie instan | ± 80 gr | 4,142 | 4,087 | 3,836 | 3,684 | 3,626 |
| 8. | Mie bakso, mie rebus, mie goreng | Porsi | 2,449 | 2,522 | 2,584 | 2,545 | 2,432 |

Sumber: BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2020

Namun kecenderungan rata-rata penurunan konsumsi beras ini dibarengi dengan semakin naiknya rata-rata konsumsi tepung terigu, yang sebesar 0,194 kg pada tahun 2015, kemudian naik 0,217 kg di tahun 2018, menjadi 0,202 kg tahun 2020. Konsumsi mie instan dan mie bakso/mie rebus/mie goreng juga cenderung naik sekalipun terdapat penurunan porsi konsumsinya pada tahun 2019 dan 2020. Data ini menunjukkan bahwa di balik rata-rata pengurangan konsumsi beras itu terindikasi digantikan oleh bahan pangan terigu dan bahan makanan yang berasal dari terigu seperti mie. Pada sisi yang lain, keberadaan jagung pipilan/beras jagung/jagung titi, dan ketela rambat/ubi jalar semakin menurun konsumsinya, dan ketela pohon/singkong berfluktuasi.

Di tengah indikasi adanya perubahan pola pangan pada jenis komoditas makanan di atas, terdapat pergeseran dalam jumlah konsumsi kalori dan protein berdasarkan kelompok komoditas. Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk padi-padian terus menurun yaitu 838,03 Kkal (2018), 814,77 Kkal (2019), 814,05 Kkal (2020). Penurunan ini diduga adanya kenaikan pada konsumsi makanan dan minuman jadi yang cenderung naik yaitu 528,42 Kkal (2018) 535,50 Kkal (2019), sekalipun turun lagi 521,43 Kkal (2020) yang diperkirakan dampak awal pandemi Covid-19. Demikian pula pada rata-rata konsumsi protein per kapita sehari: padi-padian berturut-turut 9,72 gram (2018), 19,18 gram (2019), dan 19,16 gram (2020), dan makanan dan minuman jadi 15,70 gram (2018), 16,17 gram (2019), dan 15,94 gram (2020).

Mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, sebanyak 2.100 Kilokalori (kcal) dan 57 gram protein perkapita/hari. Dengan menggunakan acuan AKG tersebut, maka rata-rata kalori dan protein yang dikonsumsi perkapita/hari pada tingkat nasional telah mencapai cukup pada Maret 2019 dan Maret 2020.

Tabel 2 - Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein Perkapita/Hari

| Daerah | Kalori (Kkal) | | Protein (Gram) | |
|-------------|---------------|------------|----------------|------------|
| | Maret 2019 | Maret 2020 | Maret 2019 | Maret 2020 |
| Perkotaan | 2.119,77 | 2.108,52 | 64,42 | 64,09 |
| Perdesaan | 2.121,47 | 2.116,55 | 59,23 | 59,31 |
| Kota & Desa | 2.120,52 | 2.112,06 | 62,13 | 61,98 |

Sumber: BPS, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2020; BPS, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2019

Sekalipun cukup dari segi jumlah kalori dan protein yang dikonsumsi namun terdapat penurunan jumlah kalori dan protein dalam batas tidak mengkhawatirkan pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Dari sebanyak 2.120,52 Kkal turun menjadi 2.112,06, dan dari 62,13 gram protein turun menjadi 61,98 gram. Gambaran rata-rata konsumsi kalori dan protein pada tingkat nasional tersebut berbanding terbalik dengan beberapa provinsi yang justru mengalami ketidakcukupan kalori dan protein sesuai dengan acuan AKG.

Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 18 provinsi yang berada di bawah 2.100 Kkl. Provinsi yang selama dua tahun berturut-turut sebanyak 16 provinsi yaitu Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Provinsi yang muncul pada tahun 2019 saja adalah Aceh dan Bengkulu, sedangkan untuk tahun 2020 adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Konsumsi protein dibawah 57 gram pada tahun 2019 dan 2020 berturut-turut adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Provinsi Lampung termasuk provinsi yang konsumsi protein di bawah 57 gram pada tahun 2019 saja. Data mengenai ketidakcukupan kalori dan protein pada tingkat provinsi ini sebagai pertanda awal bahwa masih terdapat sebagian orang termasuk golongan miskin dan golongan rentan yang harus dipenuhi pangan dan gizinya. Selain ketidakcukupan kalori dan protein dalam asupan pangan, terdapat potret persoalan gizi penting lain yakni kekurangan zat gizi mikro (vitamin dan mineral).

KESIMPULAN

Kemiskinan di Indonesia bercorak kemiskinan kronis pangan yang ditandai dengan porsi pangan lebih besar dari 50% dari jumlah pengeluaran; pangan sangat berkontribusi besar pada penentuan tingkat kemiskinan dari golongan rentan miskin menjadi miskin hingga golongan miskin semakin parah tingkat kemiskinannya; dan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan dan terjadinya inflasi. Akibat dari situasi kemiskinan kronis pangan dan rendahnya aneka pangan yang dikonsumsi (didominasi beras), maka tidak mengherankan masih terjadinya kekurangcukupan kalori dan protein sesuai acuan yang berlaku pada beberapa provinsi.

Masalah pangan pada kemiskinan kronis pangan harus dilihat sebagai situasi bertahap dan pelan-pelan yang sangat membahayakan keselamatan golongan miskin dan golongan rentan miskin karena strategi pengorbanan diri mereka sejatinya adalah eksploitasi diri. Asupan pangan dan gizi yang dikonsumsi tidak sebanding dengan kebutuhan tubuh beserta aktivitasnya sehingga dapat menurunkan dan merusak pada aspek tertentu dalam berfungsinya organ-organ tubuh mereka. Realokasi dan pengetatan porsi peruntukan pendapatan untuk pangan, pengurangan kualitas dan kuantitas jenis pangan yang dikonsumsi, dan ketidakmerataan pangan antar anggota rumah tangga (suami, istri dan anak) adalah salah satu bentuk eksploitasi diri yang diterapkan secara sosiologis yang memungkinkan berdampak buruk pada aspek fisiologis dan psikologis golongan miskin seperti daya tahan tubuh terhadap penyakit dan gangguan mental. Akumulasi situasi ini memungkinkan dalam memicu munculnya bentuk-bentuk kekerasan baik di dalam rumah tangga maupun di luar.

Identifikasi tingkat kemiskinan, dan pola konsumsi pangan termasuk perubahan dan dampaknya perlu tersedia datanya terutama oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data lainnya yang terkait. Data-data ini dalam rangka mendukung sistem peringatan dini mengenai pangan, dan kelaparan agar dapat diantisipasi dan ditanggulangi dengan segera.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik (BPS), Konsep Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, diakses di <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23> pada 26 November 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2019, Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019, Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2020, Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Susenas Maret 2020, Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2020, Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020, Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Susenas Maret 2020, Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020 No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari.

Khudori, Inflasi, Pangan, dan Kemiskinan, opini, ekonomi.bisnis diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180802/9/823467/opini-inflasi-pangan-dan-kemiskinan> tanggal 27 Oktober 2021.